

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi, serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Biro Hukum

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab																									
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis Esselon II																												
	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Presentase realisasi produk hukum daerah dan HAM yang terpublikasi (%)	Realisasi Produk Hukum Daerah dan HAM yang terpublikasi	Alasan pemilihan indikator: capaian realiasai Produk Hukum Daerah dan Ham $\frac{\text{Realisasi Produk Hukum Daerah dan HAM}}{\text{Produk Hukum Daerah dan HAM}} \times 100$	Kepala Biro Hukum																									
Indikator Kinerja Program (esselon III)																														
I Program Tata Kelola Pemerintahan Biro Hukum																														
	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan: Skala)	Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>IKM Unit Pelayanan x 25</caption> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai interval IKM</th> <th>Nilai Interval Konversi IKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 1,75</td> <td>25 – 43,75</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 – 2,50</td> <td>43,76 – 62,50</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 – 3,25</td> <td>62,51 – 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 – 4,00</td> <td>81,26 – 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik	2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik	3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik	4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik	Kepala Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum
Nilai Persepsi	Nilai interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																										
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik																										
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik																										
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik																										
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik																										
	Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan: %)	Untuk memastikan kesesuaian dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	$\frac{\sum \text{nilai dokumen perencanaan, evaluasi pelaporan}}{\sum \text{target tahun n}} \times 100$																											
	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah (Satuan: %)	untuk mengukur dukungan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kelancaran organisasi	$\frac{\sum \text{realisasi pemenuhan sarpras}}{\sum \text{target sarpras pada tahun n berdasarkan rkbmd}} \times 100$																											
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	Untuk mengukur peningkatan kapasitas apartur organisasi	$\frac{\sum \text{aparatur yang diklat, kursus, sekolah}}{\sum \text{target tahun n}} \times 100$																											
	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	Untuk mendukung akuntabilitas penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan organiasasi	$\frac{\sum \text{nilai dokumen perencanaan, evaluasi pelaporan}}{\sum \text{target tahun n}} \times 100$																											

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Biro Hukum

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
II Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum					
	Meningkatnya Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum Daerah	presentase realisasi target propemperda (Satuan: %)	Tercapainya target Propemperda (program pembentukan peraturan daerah)	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{realisasi produk hukum daerah}}{\text{jumlah produk hukum daerah}} \times 100\%$	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan
		Presentase Fasilitasi keselarasan peraturan perundangan daerah atau Kabupaten/ Kota dengan regulasi hukum nasional (Satuan: %)	Keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi hukum yang diatasnya	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{realisasi peraturan perundangan daerah provinsi atau kab/kota}}{\text{jumlah peraturan perundangan daerah provinsi atau kab/kota}} \times 100\%$	
		presentasi pelayanan bantuan hukum dan Ham (Satuan: %)	Pelayanan bantuan hukum yg ditangani dan capaian kegiatan ham	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{realisasi bantuan hukum dan ham}}{\text{jumlah bantuan hukum dan ham}} \times 100\%$	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Presentase Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum (Satuan: %)	Sosialisasi Hukum bagi kabupaten/kota se-Provinsi Banten dan jumlah Dokumentasi produk Hukum	Formulasi Perhitungan: $\frac{\text{Pelaksanaan Sosialisasi Hukum}}{\text{Jumlah Sosialisasi Hukum}} \times 100\%$	Kepala Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Produk Hukum

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Biro Hukum		Penanggung Jawab
					Rumus Perhitungan		
Indikator Kinerja Program (esselon IV)							
1.	Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum		Tersusunnya Laporan Keuangan, Dokumen Perencanaan, dan Pelayanan Perkantoran Pada Tata Usaha Biro Hukum	Untuk mencapai indikator kegiatan meliputi : pelaksanaan kinerja keuangan dan aset, pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, tersedianya barang dan jasa perkantoran, peningkatan kapasitas aparatur, pengelolaan kearsipan, koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah yang menghasilkan jumlah dokumen sebagai capaian program	Σ <i>Kegiatan Tata Usaha Biro Hukum</i>		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2.	Kegiatan Sosialisasi Hukum		Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Hukum	Untuk mencapai indikator kegiatan meliputi : peningkatan pemahaman kesadaran hukum bagi pelajar kab/kota se-provinsi banten, yang menghasilkan Jumlah sosialisasi hukum sebagai indikator capain program	Σ <i>Sosialisasi Hukum</i>		Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum
3.	Kegiatan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Terselenggaranya Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Untuk mencapai indikator kegiatan meliputi : Pengelolaan (JDIH) Provinsi Banten, Rakor Bidang Hukum Kab/Kota se-Provinsi Banten, yang menghasilkan Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai indikator capain program	Σ Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlaqul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Biro Hukum

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
4.	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah		Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah	Untuk mencapai indikator kegiatan meliputi : Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan RAPERDA Usul Gubernur, Asistensi Penyusunan Raperda yang menghasilkan Jumlah Perda sebagai indikator capain program	Σ Dokumen Peraturan Daerah	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah
5.	Kegiatan Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten		Tersusunnya Penyusunan Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten	Untuk mencapai indikator kegiatan meliputi : Penyusunan Legal Drafter Keputusan Gubernur, Rancangan Peraturan Gubernur Non APBD usul SKPD/Unit Kerja, yang menghasilkan Jumlah Rapergub dan Kepgub sebagai indikator capain program	Σ Keputusan dan Peraturan Kepala Daerah Σ Provinsi Banten	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah
6.	Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota		Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Untuk mencapai indikator kegiatan meliputi : Evaluasi Raperda Kab/Kota, Fasilitasi Raperda Kab/Kota, yang menghasilkan Jumlah Raperda sebagai indikator capain program	Σ Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota
7.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum		Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum	Untuk mencapai indikator kegiatan meliputi : Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sebagai indikator capain program	Σ Pelayanan Bantuan Hukum	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlaul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat

Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien

Biro Hukum						
No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
8.	Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum		Terlaksananya Penanganan Sengketa Hukum	Untuk mencapai indikator kegiatan meliputi : Penanganan perkara/sengketa hukum di Pradilan Litigasi dan Non Litigasi yang menghasilkan jumlah perkara sebagai indikator capain program	Σ Penanganan Sengketa Hukum	Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum
9.	Kegiatan Perlindungan Hukum dan HAM		Tercapainya Perlindungan Hukum dan HAM bagi Kab/Kota	Untuk mencapai indikator kegiatan meliputi : HAM bagi Masyarakat dan Pelajar Kab/Kota se-Provinsi Banten, Harmonisasi Raperda yang Berpresfektif HAM, (RANHAM) Provinsi Banten yang menghasilkan jumlah pelaksanaan kegiatan sebagai indikator capain program	Σ Perlindungan Hukum dan HAM Kab/Kota	Kepala Sub Bagian Hak Asasi Manusia

Serang, 2019

KEPALA BIRO HUKUM


AGUS MINTONO, SH.,M.Si
NIP. 19680805 199803 1 010